

EFEKTIFITAS KERJA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) DESA DALAM VERIFIKASI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DI DESA CIWARINGIN KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON

¹Ratih Fatikha Sari, ²Rochmat Hidayat, ³Eka Wildanu

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Cirebon

Kampus 1: Jl. Tuparev No. 70 Cirebon 45153 Kampus 2: Jl. Fatahilah – Watubelah-
Cirebon email: rektorat@umc.ac.id website: www.umc.ac.id ratihfs21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas kerja dalam hal verifikasi data bantuan sosial oleh Pusat Kesejahteraan Sosial Desa (Puskesmas) di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait verifikasi data penerima bantuan sosial dan pendataan masyarakat pra sejahtera, Puskesmas 'Annisa' Desa Ciwaringin sudah efektif. Dilihat dengan pencapaian indikator mengenai efektifitas kerja diantaranya Transparansi, Tujuan, Strategi, Mekanisme, Cara Kerja, Perencanaan, Penyusunan Program, Sarana Prasarana, Pelaksanaan Dan Evaluasi kerja sesuai dengan Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 161 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Dan Pusat Kesejahteraan Sosial Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.

Kata Kunci : Efektifitas Kerja, Verifikasi Data, Bantuan Sosial

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of work in terms of verification of social assistance data by the Village Social Welfare Center (Puskesmas) in Ciwaringin Village, Ciwaringin District, Cirebon Regency. This research method is descriptive research with a qualitative descriptive approach. The results of the study show that in carrying out its duties and functions related to data verification of recipients of social assistance and data collection for underprivileged communities, the 'Annisa' Village Health Center in Ciwaringin has been effective. Judging by the achievement of indicators regarding work effectiveness including Transparency, Objectives, Strategies, Mechanisms, Working Methods, Planning, Programming, Infrastructure, Implementation, and Work Evaluation by the Regulation of the Director-General of Social Empowerment Number 161 of 2020 concerning General Guidelines for the Implementation of Service Systems and Integrated Referral and Social Welfare Center For Handling The Poor And Poor People.

Keywords: Work Effectiveness, Data Verification, Social Assistance

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang

berkenaan dengan pembangunan manusia. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan, kemiskinan

sebagai pengukur bahkan sebagai tanda bahwa masyarakat tersebut kurang sejahtera

Dari permasalahan mengenai kemiskinan, pemerintah mempunyai pengaruh besar dalam proses penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang sedang dihadapi oleh pembangunan nasional dalam meningkatkan kinerja perekonomian guna tercipta lapangan kerja dan tertatanya kehidupan dengan tujuan terwujudnya kesejahteraan penduduk Indonesia. Agar dapat tercapainya tujuan tersebut, maka kemiskinan harus disembuhkan atau di kurangi.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab atas kelangsungan dan kesejahteraan rakyatnya melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah adalah mengeluarkan ketentuan mengenai penyaluran bantuan sosial yang dianggarkan dari APBN maupun APBD. Bantuan Sosial diperuntukan bagi warga tidak mampu untuk meringankan beban tanggungan hidup serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, banyak program penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pemenuhan kriteria tersebut. Program-program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomis Produktif

(UEP), Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), Kartu KeluargaSejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pinter (KIP), dan program – program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Dalam hal ini pemerintah melalui kementerian sosial membuat suatu kebijakan yaitu seperti tertuang dalam permensos no 13 tahun 2014 yang berisi mengenai pembentukan SLRT/ PUSKESOS yaitu sumber daya manusia yang membantu pemerintah dalam hal pendataan mengenai masyarakat pra sejahtera dan penanggulangan kemiskinan ditingkat Kabupaten/ Kota dan dibawahnya, dirancang untuk mempercepat keluarga miskin, rentan mengakses bantuan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di pusat dan daerah, membantu mengidentifikasi kebutuhan keluarga miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) dan nonpemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka, guna mendata, membantu mengidentifikasi keluhan keluarga miskin dan rentan miskin melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan- keluhan tersebut dengan baik.

Hadirnya Puskesmas di Desa/ Kelurahan menjadi ujung tombak untuk meningkatkan pelayanan publik, sekaligus sebagai pusat aktivitas masyarakat. Salah satu penyelenggaraan pemerintah yang menjadi ruang lingkup dalam pelayanan yaitu penyelenggaraan layanan, yang diharapkan dapat memeberikan pelayanan secara efektif dan efisien kepada masyarakat, serta dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengenai permasalahan data seperti halnya penerima bantuan sosial yang ganda, data tidak

sesuai antara NIK penerima dan didata penerima bantuan sosial, bantuan sosial tidak tepat sasaran, verifikasi data diragukan ke aslian nya, masyarakat yang berhak tidak tercantum, semua permasalahan tersebut dikembalikan kepada efektifitas kerja pusat kesejahteraan sosial di desa tersebut.

Banyaknya data yang puskesmas verifikasi dan harus sesuai dengan ketentuan, tentunya kerja yang dilakukan puskesmas harus efektif. Permasalahan data penerima bantuan sosial tentunya dapat kita lihat dari efektifitas kerja puskesmas itu sendiri, bantuan sosial sendiri ditetapkan melalui kebijakan yang pasti tentunya dalam masalah pendataan penerima bantuan sosial pun harus baik agar tercapainya tujuan itu sendiri. masalah verifikasi data penerima bantuan sosial oleh petugas puskesmas yang harus efektif mengacu pada latar belakang tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Kerja Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Desa Dalam Verifikasi Data Penerima Bantuan Sosial Di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

Efektivitas kerja adalah suatu ukuran dan kemampuan dalam melaksanakan fungsi, tugas, program atau misi dari suatu organisasi ataupun kebijakan sesuai dengan target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah ditetapkan baik pemerintah maupun swasta. Efektivitas pekerjaan merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi atau kebijakan program.

Seperti halnya kerja yang dilakukan oleh pusat kesejahteraan sosial desa dalam verifikasi data penerima bantuan sosial, efektifitas kerja dapat diukur dari cara kerja puskesmas apakah sudah efektif, keefektifan

tersebut menjadi kunci tercapainya tujuan dengan terarah dan baik. Dalam hal ini untuk melihat efektif kerja yang dilakukan puskesmas. Menurut Agung Kurniawan (2005:109), efektifitas kerja adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Konsep Efektivitas Kerja

Efektivitas kerja terdiri dari dua kata yaitu efektifitas dan kerja, Menurut Agung Kurniawan (2005:109), efektifitas kerja adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Menurut pendapat Mahmudi (2005:92), Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, atau kegiatan” Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektifitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Indikator dan Kriteria Efektivitas Kerja

Menurut Agung Kurniawan (2005:109), indikator efektifitas kerja adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, Merupakan Penentuan Cara, jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu, dampak dan pemusatan upaya.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.
- e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana, sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, apabila suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Menurut Martani dan Lubis (1987), kriteria yang digunakan untuk mengukur efektivitas kerja adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Sumber (*resource approach*), yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan Proses (*process approach*), adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan Sasaran (*goals approach*), dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Konsep Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Desa

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu, Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/ kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Puskesmas merupakan lembaga yang dibentuk oleh Desa atau Kelurahan. Maksud dan tujuan puskesmas adalah memudahkan masyarakat miskin dan rentan miskin di Desa atau Kelurahan terkait, dalam menjangkau pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, Desa dan Kelurahan, serta Swasta atau CSR. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa dan Kelurahan, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap aturan dan anggaran, untuk kelancaran dan

keberhasilan pelaksanaan Puskesmas. Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial) diharapkan dapat mendorong terhadap peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Selain itu, juga merupakan sistem rujukan pelayanan terpadu kepada masyarakat.

Konsep Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Program Bansos untuk rakyat Indonesia terdiri dari Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Puskesmas Annisa Desa Ciwaringin,

Puskesmas merupakan program dari Kementerian Sosial yang didirikan untuk menangani masalah kesejahteraan sosial. Puskesmas "ANNISA" merupakan organisasi yang dibentuk dan dilaksanakan oleh Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon yang bertujuan untuk memudahkan warga miskin atau rentan miskin di wilayah desa untuk menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh Pemerintahan Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa/

Kelurahan. Puskesmas di wilayah Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon diharapkan dapat memberikan output yang baik untuk keberlangsungan hidup masyarakat.

Deskriptif Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai Efektifitas Kerja Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Desa Dalam Verifikasi Data Penerima Bantuan Sosial Di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Pengukuran mengenai efektifitas kerja Menurut Kurniawan (2005), yang penulis operasionalkan menjadi transparansi, tujuan, strategi, mekanisme, cara Kerja, perencanaan, penyusunan program, sarana prasarana, Pelaksanaan dan Evaluasi kerja. Strategi dan cara kerja yang dilakukan puskesmas mengenai pendataan masyarakat miskin adalah verifikasi data bantuan sosial secara langsung dalam hal ini dilakukan dengan cara mengunjungi rumah masyarakat miskin tujuannya mengetahui secara langsung agar sejauh mana permasalahan yang dihadapi dan bisa dilakukan pendataan, mekanisme pendataan tetap sesuai prosedur menyeluruh dan sistematis. Dapat dikatakan bahwa petugas Puskesmas Annisa Desa Ciwaringin bisa menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan, bisa mendukung dan memfasilitasi Prosedur verifikasi data yang terarah serta pembagian kerja petugas puskesmas dalam verifikasi data penerima bantuan sosial di tingkat Desa sesuai dengan dimensi Transparansi, Tujuan, Strategi, Mekanisme, Cara Kerja beserta indikatornya.

Puskesmas Annisa Desa Ciwaringin mempunyai Visi Misi Penunjang Kerja yaitu mengikuti visi misi desa yang digaris bawahi lebih mengerucut kepada kesejahteraan masyarakat melalui pendataan penerima bantuan sosial, Puskesmas Annisa Desa Ciwaringin memiliki banyak Rincian Program Kerja diantaranya

ada donor darah, bimbel untuk anak dan beberapa program kerja lain yang sudah direncanakan tetapi belum direalisasikan karena ada beberapa kendala termasuk pandemi covid 19 ini. Puskesmas Annisa Desa Ciwaringin dalam Pembagian Tugas Sesuai Kemampuan. Dalam hal ini jika perbandingan data sebelum dan sesudah dilakukan nya verifikasi menunjukkan bahwa ada kerja yang baik dalam hal verifikasi data, baik perbaikan maupun pengusulan sehingga data yang diperoleh benar valid, menurut beberapa uraian diatas bahwa petugas puskesmas telah efektif dalam pembagian waktu kerja, baik dalam membuat perencanaan dan sehingga beberapa program dan agenda kerja dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dikatakan efektif juga ketika melakukan prosedur kerja mengutamakan ketetapan waktu.

Penyediaan sarana dan Prasarana Petugas Puskesmas Annisa Desa Ciwaringin selalu berkoordinasi dengan desa dalam pengadaannya, berkoordinasi sesuai ketentuan, adapun yang hasil koordinasi dan musyawarah mengenai fasilitas sarana prasarana diantaranya: sekertariat puskesmas, computer 1 paket, 1 handphone untuk fasilitator, ruang pertemuan, ruang kerja, fasilitas tersebut menurut beberapa informan ada kekurangan nya menurut informasi sekertariat puskesmas belum sepenuhnya memadai hal ini dikarenakan masih belum tepatnya kondisi ruangan terlebih lagi masih dicampur dengan ruangan bidan desa dan ruang PKK jadi kendalanya tidak dapat menampung banyak orang berakibat dalam setiap pertemuan yang melibatkan banyak orang harus menggunakan aula desa. Dalam dimensi dan indikator diatas menurut semua informan penelitian yang penulis cari informasinya bahwa Kelengkapan Sarana Prasarana Seperti Sekertariat Puskesmas, Computer, Printer Dsb ada, dengan kondisi yang Baik, baik Fisik Maupun Non Fisik

dan jelas memiliki Fungsi Menunjang Efektifitas Kerja Petugas Puskesmas.

Dalam hal ini peran pemerintah dan masyarakat juga perlu diterapkan di dimensi ini karena evaluasi data maupun kerja perlu dilaksanakan, untuk evaluasi kerja sendiri Puskesmas Annisa Desa Ciwaringin rutin melakukan evaluasi, untuk evaluasi verifikasi data penerima bantuan sosial rutin dilakukan apabila ada intruksi dari pusat SLRT kabupaten, untuk sejauh ini masyarakat dan pemerintah juga puskesmas sendiri merasa sudah efektif dalam melakukan kerja, masyarakat miskin degan hadirnya puskesmas terbantu, pendataan yang dilakukan puskesmas sudah baik sesuai prosedur. Sebagai bukti efektifitas kerja dalam verifikasi data yang dilakukan Puskesmas Annisa Desa Ciwaringin adalah, Verifikasi Bantuan Sosial Tunai (BST) POS, dan Bantuan Pangan Non Tunai, setelah diperbaiki dan diusulkan akibat adanya pergantian semua data tersebut valid, baik NIK mamupun nomer KK, penerima bantuan sudah sesuai dapat diartikan sebagai yang tepat dan membutuhkan.

Efektivitas dalam kerja adalah suatu ukuran dan kemampuan dalam melaksanakan fungsi, tugas, program atau misi dari suatu organisasi ataupun kebijakan sesuai dengan target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah ditetapkan baik pemerintah maupun swasta. Efektivitas pekerjaan merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi atau kebijakan program. Dalam hal ini Seperti kerja yang dilakukan oleh pusat kesejahteraan sosial desa dalam verifikasi data penerima bantuan sosial, efektifitas kerja dapat diukur dari cara kerja puskesmas apakah sudah efektif, keefektifan tersebut menjadi kunci tercapainya tujuan dengan terarah dan

baik. Menurut Kurniawan (2005), efektivitas kerja adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Dalam Hal ini Terdapat tahap pelaksanaan dan pembentukan Puskesmas annisa Desa Ciwaringin Kabupaten Cirebon melalui beberapa tahapan yaitu Bimtek SLRT atau sosialisasi program Puskesmas, Koordinasi Kepala Desa/ Kelurahan dan BPD, Toma, Toga, Pemetaan potensi sumber daya Desa/Kelurahan (PSM, CSR Desa, dll), Penentuan struktur kelembagaan (front office dan back office), SK kepala Desa/ Kelurahan, Sosialisasi Puskesmas. Diterapkan dimensi transparansi seperti yang dikatakan oleh semua informan yang penulis wawancara, dalam hal pemilihan Petugas Puskesmas Annisa Desa Ciwaringin sesuai kesepakatan dan sesuai prosedur. Terdapat 9 (sembilan) sektor program yang perlu diketahui masyarakat, antara lain:

1. Kesehatan, seperti Program Indonesia Sehat
2. Pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar
3. Sosial dan ekonomi, seperti Program Keluarga Harapan
4. Pangan, seperti Program Sembako
5. Energi, antara lain subsidi listrik, subsidi gas
6. Pertanian, seperti subsidi pupuk
7. Perikanan, antara lain asuransi bagi budi daya ikan
8. Perumahan, seperti rumah tinggal layak huni (rutilahu),
9. Administrasi kependudukan, seperti pengurusan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, KTP, dan seterusnya Jika di daerah setempat tersedia program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan lainnya, hal tersebut perlu diinformasikan kepada masyarakat.

Dalam hal ini Petugas puskesmas Annisa Desa Ciwaringin dalam melakukan pelayanan pendataan tentu adanya sebuah kebijakan dalam pelaksanaannya, ada waktu yang telah ditentukan, baik target maupun intruksi dari lembaga atasan. sehingga dalam puskesmas harus bisa manajemen waktu dengan baik agar tujuan dapat tercapai dengan waktu yang efektif.

Sesuai ketentuan dalam beberapa peraturan yang mengarah bahwa dalam proses verifikasi data diperlukan sarana prasarana yang menunjang hal ini bertujuan agar berjalan nya proses verifikasi dengan lancar. Dalam hal ini peran desa dalam pengadaan sarana prasarana sangat diutamakan. Sesuai ketentuan bahwa desa yang akan melakukan pengadaan sarana prasarana yang tujuannya penunjang kerja. Koordinasi sangat penting dalam pengadaan fasilitas pemuthakiran data/ verifikasi data penerima bantuan sosial.

Pelaksanaan kerja serta evaluasi kerja petugas puskesmas dalam verifikasi data penerima bantuan sosial, Pengawasan dan evaluasi kerja yang dilakukan puskesmas, pemerintah desa, masyarakat dalam melakukan pendataan dan verifikasi data penerima bantuan sosial. Puskesmas annisa desa ciwaringin selalu melakukan evaluasi secara rutin baik pendataan maupun verifikasi data pusat penerima bantuan sosial, selain itu petugas puskesmas juga menerima kritik saran dalam kerjanya sehingga dalam melaksanakan kerjanya selalu berbenah, selalu efektif dan sangat baik. Dalam hal ini peran pemerintah dan masyarakat juga perlu diterapkan di dimensi ini karena evaluasi data maupun kerja perlu dilaksanakan, untuk evaluasi kerja sendiri puskesmas annisa desa ciwaringin rutin melakukan evaluasi, untuk evaluasi verifikasi data penerima bantuan sosial rutin dilakukan apabila ada intruksi dari pusat / SLRT kabupaten, untuk sejauh ini masyarakat dan pemerintah juga puskesmas sendiri

merasa sudah efektif dalam melakukan kerja, masyarakat miskin dengan hadirnya puskesmas terbantu, pendataan yang dilakukan puskesmas sudah baik sesuai prosedur. Sebagai bukti efektifitas kerja dalam verifikasi data yang dilakukan puskesmas Annisa Desa Ciwaringin adalah, verifikasi bantuan sosial tunai (BST) pos, dan bantuan pangan non tunai, setelah diperbaiki dan diusulkan akibat adanya pergantian semua data tersebut valid, baik nik maupun nomer kk, penerima bantuan sudah sesuai dapat diartikan sebagai yang tepat dan membutuhkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas kerja yang dilakukan Puskesmas Annisa Desa Ciwaringin dalam verifikasi data penerima bantuan sosial tersebut sesuai dengan tujuan puskesmas. Hal ini dapat dilihat dari dimensi dan indikator mengenai efektifitas kerja yaitu:

Dimensi Transparansi, Tujuan, Strategi, Mekanisme, Cara Kerja

Dalam hal transparansi pembentukan Puskesmas Annisa Desa Ciwaringin melalui musyawarah dalam arti dimensi transparansi dilakukan dengan baik, tetapi dimensi transparansi ini hanya dilingkup desa saja, dengan kata lain hanya melibatkan elemen perangkat desa dan lembaga desa. Masyarakat hanya mengetahui setelah sudah terbentuknya puskesmas itu sendiri tidak dilibatkan dalam musyawarah pembentukannya. Puskesmas Annisa Desa Ciwaringin dalam memahami tugas fungsinya, Memberikan layanan, menangani dan menyelesaikan keluhan mengenai pendataan dan pengolahan data masyarakat pra sejahtera di Desa Ciwaringin, tetapi jika masih ditemukan permasalahan mengenai data disini merupakan kebijakan pusat, karena puskesmas itu sendiri hanya verifikasi dan pelaporan. Puskesmas Annisa Desa

Ciwaringin dapat Mendukung dan memfasilitasi Prosedur verifikasi data yang terarah serta adanya pembagian kerja petugas puskesmas Desa, hal ini sesuai dengan dimensi Transparansi, Tujuan, Strategi, Mekanisme, Cara Kerja beserta indikatornya.

Dimensi Perencanaan Dan Penyusunan Program,

Puskesmas Annisa Desa Ciwaringin dalam melakukan pendataan serta verifikasi yang dilakukan petugas puskesmas ada manajemen waktu, dimana waktu di pergunakan seefektif mungkin agar dalam melaksanakan tugas tersebut bisa tepat waktu. Puskesmas Annisa Desa Ciwaringin dalam perencanaan dan program kerjanya sudah baik, ada beberapa program kerja puskesmas Annisa juga diluar verifikasi data. Puskesmas Annisa Desa Ciwaringin selalu mengedepankan Ketepatan Waktu Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terkait Penyelesaian Proses Verifikasi Data Penerima Bantuan Sosial. Untuk pembagian tugas dibagi menjadi 4 (empat) yaitu koordinator, fasilitator, backoffice dan front office menurutnya juga sudah sesuai kemampuan dalam pembagian tugas dan sudah maksimal kerjanya.

Visi Misi Penunjang Kerja yaitu mengikuti visi misi desa yang digaris bawahi lebih mengerucut kepada kesejahteraan masyarakat melalui pendataan penerima bantuan sosial, Puskesmas Annisa Desa Ciwaringin memiliki banyak Rincian Program Kerja diantaranya ada donor darah, bimbel untuk anak dan beberapa program kerja lain yang sudah direncanakan tetapi belum direalisasikan karena ada beberapa kendala termasuk pandemi covid 19 ini. Perbandingan data sebelum dan sesudah puskesmas melakukan verifikasi pada semua data penerima bantuan sosial, dalam hal verifikasi data sudah baik sehingga mendapatkan data yang valid tetapi kurang koordinasi dengan

pihak kepala dusun / kadus yang merupakan wilayah kerjanya.

Dalam hal penyediaan sarana dan Prasarana Petugas Puskesmas Annisa Desa Ciwaringin selalu berkoordinasi dengan desa dalam pengadaannya, berkoordinasi sesuai ketentuan, adapun yang didapat dari koordinasi dan musyawarah diantaranya: sekretariat puskesmas, computer 1 paket, 1 handphone untuk fasilitator, ruang pertemuan, ruang kerja, dalam hal ini ada kekurangannya menurut informasi sekretariat puskesmas belum sepenuhnya memadai hal ini dikarenakan masih belum tepatnya kondisi ruangan terlebih lagi masih dicampur dengan ruangan bidan desa dan ruang PKK jadi kendalanya tidak dapat menampung banyak orang jadi jika ada pertemuan yang melibatkan banyak orang masih menggunakan aula desa. Kelengkapan Sarana Prasarana Seperti Sekretariat Puskesmas, *Computer*, Printer Dsb ada, dengan kondisi yang Baik, baik Fisik Maupun Non Fisik dan jelas memiliki Fungsi Menunjang Efektifitas Kerja Petugas Puskesmas.

Pelaksanaan Dan Evaluasi

Pelaksanaan kerja serta evaluasi kerja petugas puskesmas dalam verifikasi data penerima bantuan sosial, Pengawasan dan evaluasi kerja yang dilakukan puskesmas, pemerintah desa, masyarakat dalam melakukan pendataan dan verifikasi data penerima bantuan sosial dilakukan secara rutin. Untuk evaluasi verifikasi data penerima bantuan sosial rutin dilakukan apabila ada intruksi dari pusat / SLRT kabupaten, untuk sejauh ini masyarakat dan pemerintah juga puskesmas sendiri merasa sudah efektif dalam melakukan kerja, masyarakat miskin dengan hadirnya puskesmas terbantu, pendataan yang dilakukan puskesmas sudah baik sesuai prosedur.

Berangkat dari kesimpulan hasil penelitian diatas dalam kerjanya yang dikatakan

efektif tentunya masih ditemukan beberapa bahan yang nantinya bisa dipergunakan sebagai evaluasi kedepan, penulis diantaranya menemukan beberapa hal sebagai saran untuk Petugas Puskesmas Annisa Desa Ciwaringin:

- a. Mengenai Transparansi Kebijakan Dibentuknya pusat kesehatan sosial desa ditemukan bahwa transparansi memang dilakukan tetapi sebaiknya selain melibatkan lembaga desa dilibatkan juga masyarakat.
- b. Mengenai petugas puskesmas melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan mengenai pendataan dan pengolahan data masyarakat pra sejahtera dalam hal ini saran penulis dalam melakukan pelayanan ditingkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat tujuannya agar masyarakat mengetahui secara luas mengenai pelayanan dan proses pendataannya, mungkin dengan cara pendekatan dengan masyarakat mengenai permasalahan dan solusinya, misalnya seperti pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan puskesmas selain penanganan mengenai bantuan sosial.
- c. Mengenai Perencanaan dan penyusunan Program, dalam hal ini lebih ditingkatkan lagi koordinasi dengan lembaga desa mengenai hal perencanaan dan penyusunan program, masih sama seperti dimensi awal puskesmas annisa harus lebih ditingkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui secara keseluruhan fungsi dan tugas dibentuknya puskesmas di desa.
- d. Dimensi yang ketiga mengenai Sarana Dan Prasarana, saran penulis puskesmas berkoordinasi lagi dengan desa, melakukan musyawarah bersama lembaga desa terkait penambahan pengadaan sarana seperti laptop, computer, printer, ATK, ruang pertemuan, papan informasi yang lebih jelas dalam artian khusus untuk

informasi mengenai ranah kerja puskesmas. Untuk Pelaksanaan kerja serta evaluasi kerja petugas puskesmas dalam verifikasi data penerima bantuan sosial diperlukan evaluasi secara rutin agar petugas puskesmas terus berbenah dalam kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrasi Perkantoran Modern, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 2000), h.26
- Hasibuan, S.P Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 94.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 85-89.
- Karambut, Christien Adriani “*Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pada Pt. Asri Griya Utama, Project Holland Village Manado*” Jurnal Manis Volume 1 Nomor 2 (Juli2017) Diakses Pada 20 November 2020 <https://elib.unikom.ac.id/>
- Kultsum, Umami “*Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Kerja Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Pt. Trasti Global Konverta*” Journal Of Business Studies Volume 2 No. 1 (Desember 2017) : 2 Diakses pada 22 Desember2020. <http://journal.uta45jakarta.ac.id>
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Pembaharuan. Hal 109.
- Lexi J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 2.
- Lubis, S.M., dan Huseini, Martani. 1987. *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial.
- O'reilly, Ronald. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Permensos No 15 Tahun 2018 tentang Sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 161 tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Dan Pusat Kesejahteraan Sosial Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu
- Richard M. Strees, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Air Langga,1990), Cet. Ke-1, h. 1. 3 Richard M. Steers, *Efektivitas kerja*, (Jakarta:12PT. Gramedia Pustaka Utama,1985).
- Robbins, S.P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Index.
- Saleh, A Muwafik. 2010. *Manajemen Pelayanan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2005), h. 64.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, hlm. 335-336.
- Undang - Undang 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa